



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Peneltian	11
E. Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum	16
B. Tinjauan Umum Otonomi Daerah	20
1. Teori Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Otonomi Daerah (<i>local autonomy</i>) di Pemerintahan Daerah Kabupaten	20
2. Diskresi dan Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten	22
C. Tinjauan Umum Peraturan Daerah Kabupaten	25
1. Azaz Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten	25
2. Program Pembentukan Peraturan Daerah	27
3. Pentingnya Naskah Akademis dalam Pembentukan Peraturan Daerah	28
4. <i>Executive Review</i>	28



BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis,Sifat, dan Lokasi Penelitian	32
B. Sumber Data	33
1. Data Primer	34
2. Data Sekunder	36
C. Teknik dan Alat Pengumpul Data	40
D. Analisis Data	41
E. Tahapan Penelitian	42
F. Kesulitan yang Timbul Selama Penelitian dan Cara Memecahkannya	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Politik Hukum Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Tasikmalaya	45
B. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Masih Menggunakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagai Justifikasi Pencatatan Perkawinan Yang Bertolak Belakang Dengan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan	66
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75